

Belajar Demokrasi Di Sekolah: Sebuah Kajian Filosofis

Indraningsih* dan Sri Poedjiastoeti**

Mahasiswa S3 Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada
amourviolet@yaho.com; sipoed11@yahoo.com

Abstrak

Demokrasi, dalam pendidikan, memiliki makna yang lebih luas daripada pengertian demokrasi yang berhubungan dengan pemerintahan. Demokrasi merupakan sebuah bentuk kehidupan sosial yang mengutamakan aspek saling pengaruh satu sama lain yang tersistematisasi dalam peranan dan partisipasi suka rela dari setiap individu yang terlibat. Peranan demokrasi di dalam pendidikan merupakan hal yang umum dijumpai terutama dalam cara mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan tanpa memandang ras, kelas, dan batasan wilayah nasional/kebangsaan. Di dalam pendidikan, faktor-faktor tersebut (diskriminasi ras, kelas, dan bangsa) harus dihilangkan. Pendidikan yang demokratis selalu mengacu pada permasalahan moral, terutama moral masyarakat di lingkungan sekolah. Dewey menekankan bahwa permasalahan moral harus tercakup dalam semua aspek pendidikan yang demokratis dan progresif. Di dalam kurikulum, permasalahan nilai-nilai kehidupan demokrasi diseleksi dengan bijaksana dan mengarahkan seluruh pihak untuk aktif dalam mengisi kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam lingkungan sekolah. Kurikulum dianggap sebagai satu sarana yang memungkinkan peserta didik merekonstruksi atau memahami konteks kemanusiaan dan kemasyarakatan dari suatu tindakan. Nilai-nilai kehidupan demokrasi yang dapat dikembangkan di sekolah antara lain: (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan suka rela; (2) membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, baik kekerasan psikis maupun fisik; (3) menghargai keanekaragaman (pluralitas); (4) keadilan dalam memajukan ilmu pengetahuan atau menuntut ilmu; (5) memberikan hak dan tanggung jawab yang memadai bagi semua pihak. Pendidikan yang demokratis di sekolah juga mengajarkan toleransi. Toleransi bukanlah sikap alami, melainkan suatu sikap permanen yang dipelajari untuk mengatasi sikap permusuhan antarteman. Toleransi mengisyaratkan suatu konfrontasi antara opini-opini, saling pengakuan antarmereka, dan usaha bersama untuk mencari keadilan, tanpa menggunakan kekerasan. Hal tersebut berguna untuk menghindari tawuran/perkelahian antarsiswa. Pendidikan bernilai demokratis di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila, antara lain bersikap adil terhadap sesama, berkasih sayang, menjunjung tinggi manusia yang berdasarkan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Perikehidupan demokratis harus dilaksanakan di dalam semua aspek pendidikan.

* Dosen Fak. Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

** Dosen Fak. Hukum Universitas Islam Bandung

A. PENDAHULUAN

Siswa Sekolah Menengah terlibat tawuran sudah merupakan hal yang sering disaksikan masyarakat, baik di kota besar maupun kota kecil. Baku hantam antarsekolah atau antarsiswa satu sekolah justru menjadi kebanggaan dan siswa bahkan rela meninggalkan jam-jam pelajaran demi sebuah perkelahian. Tawuran antarsiswa tentu saja menyingkirkan harapan masyarakat tentang transformasi pengetahuan dan perilaku intelektual yang berjalan dengan baik. Benar adanya bahwa siswa sedang berada dalam masa yang labil dan kerap kali tidak berpijak pada aras rasional yang konstruktif. Namun demikian, fenomena tawuran tersebut dapat diminimalisir antara lain dengan pengembangan alam demokratis di sekolah.

Pendidikan dalam arti secara umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi yang terdahulu untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada generasi penerusnya untuk memungkinkan melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaik-baiknya (Prasetya, 2002: 15). Menurut John Dewey, pendidikan merupakan metode ilmiah untuk mempelajari dunia, memperoleh pengetahuan tentang makna dan nilai secara menyeluruh. Dalam proses pendidikan harus ada kesinambungan dan interaksi antara siswa atau anak didik dengan yang dipelajari, sehingga tidak terjadi reduksi dan pertentangan dengan kenyataan. Proses pendidikan bukan suatu instrumen kosong, teralienasi dan a-kontekstual tetapi justru harus merupakan instrumen yang strategis yang betul-betul hidup dalam situasi sosial aktual.

Demokrasi, dalam pendidikan, memiliki makna yang lebih luas daripada pengertian demokrasi yang berhubungan dengan pemerintahan (Dewey: 2004: 83). Demokrasi merupakan sebuah bentuk kehidupan sosial yang mengutamakan aspek saling pengaruh satu sama lain yang tersistematisasi dalam peranan dan partisipasi suka rela dari setiap individu yang terlibat. Peranan demokrasi di dalam pendidikan merupakan hal yang umum dijumpai terutama dalam cara mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan tanpa memandang ras, kelas, dan batasan wilayah nasional/kebangsaan. Di dalam pendidikan, faktor-faktor tersebut harus dihilangkan.

Pendidikan yang demokratis selalu mengacu pada permasalahan moral, terutama moral masyarakat di lingkungan sekolah. Dewey (Haricahyono, 1995: 60) menekankan bahwa permasalahan moral harus tercakup dalam semua aspek pendidikan yang demokratis dan progresif. Di dalam kurikulum, permasalahan nilai-nilai kehidupan demokrasi diseleksi dengan bijaksana dan mengarahkan seluruh pihak untuk aktif dalam mengisi kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam lingkungan sekolah. Kurikulum dianggap sebagai satu sarana yang memungkinkan peserta didik merekonstruksi atau memahami konteks kemanusiaan dan kemasyarakatan dari suatu tindakan.

B. PERANAN FILSAFAT PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

Agar proses pendidikan berjalan sebagaimana mestinya perlu dibangun dan diletakkan dasar filsafat pendidikan yang sistematis, positif dan konstruktif. Oleh karena itu, John Dewey menempatkan aspek pengalaman sebagai nilai penting yang menjadi dasar filsafat pendidikan. Konsep pendidikan menurut John Dewey adalah *“Education is that reconstruction or reorganisation of experience which adds to the meaning*

experience and which increases ability to direct the course of subsequent experience” (Prasetya, 2002: 26). Definisi tersebut menunjukkan bahwa John Dewey menekankan proses kegiatan pendidikan berasal dari dalam diri para siswa sehingga proses pendidikan akan kreatif dan selektif dari pihak siswa.

Komponen dasar pendidikan yang kreatif dan selektif sebagaimana tersebut di atas, menurut John Dewey terdiri (1) siswa (*learner*) adalah suatu organisme hidup, merupakan suatu fenomena biologis dan sosiologis, yang mempunyai perangsang atau kata hati yang dirancang untuk menopang kehidupan; (2) Siswa berada dalam suatu lingkungan atau habitat alamiah dan sosial; (3) Siswa digerakkan oleh pengalaman pribadi yaitu suatu pribadi yang aktif dan sibuk dalam berinteraksi dengan lingkungan; (4) Interaksi dengan lingkungan menghasilkan permasalahan yang dicari oleh individu sesuai dengan minatnya, dan (5) Proses belajar tentang pemecahan masalah ada di dalam kehidupan sehari-hari (Gutek, 1988: 94).

Komponen dasar tersebut dapat dipenuhi melalui kondisi pendidikan yang demokratis karena siswa dimungkinkan untuk berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya secara aktif, kreatif, dan selektif dalam menyerap pengalaman yang berguna bagi dirinya. Istilah demokrasi dalam hal ini digunakan dalam dua pengertian, pertama, demokrasi menunjukkan suatu pemerintahan rakyat; kedua, demokrasi sebagai pandangan hidup suatu kelompok masyarakat terhadap prinsip moral yang menegaskan kontrol tingkah laku individu dan kelompok (Kilpatrick, 1957: 127). Demokrasi sebagai pandangan hidup merupakan kebutuhan setiap manusia dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama, bertitik tolak pada kesejahteraan umum dan seluruh perkembangan manusia sebagai individu.

“The keynote of democracy as way of life may be expressed, it seems to me, as the necessity for the participation of every mature human being in information of the values that regulate the living of men together: which is necessary from the standpoint of both the general social welfare and the full of human beings as individuals” (Dewey, 2004: 58).

Konsep demokrasi menempatkan individu-individu bukan sebagai objek tetapi secara keseluruhan sebagai bangunan sosial yang memiliki sumber potensial dan harus dilayani. Sebagaimana dikatakan oleh Dewey:

“It is part of democratic conception that they as individuals are not the only sufferers, but that the whole social body is deprived of the potential resources that should be at its service” (Dewey, 2004: 58).

Demokrasi menurut Kilpatrick (1957: 139-142) memiliki enam prinsip fundamental yaitu : (1) *Sovereignty of the living individual*, yaitu kedaulatan hidup individual; (2) *The principle of equality: equal rights for all* yaitu prinsip persamaan, terutama persamaan hukum bagi semua anggota masyarakat; (3) *Rights imply duties* yaitu hukum secara tidak langsung menyatakan dengan tegas kewajiban bagi seluruh masyarakat; (4) *Cooperative effort for the common good* ialah usaha bekerjasama bagi kebaikan umum; (5) *Faith in the free play of intelligence: discussion and persuasion, not force or violence* ialah kepercayaan pada kebebasan berpikir, terutama dengan diskusi dan persuasi, dan bukan dengan kekuatan dan kekerasan; (6) *Freedom of discussion* ialah kebebasan berdiskusi, berkaitan dengan prinsip kebebasan berpikir (Kilpatrick, 1957: 139-142).

Landasan demokrasi adalah kepercayaan pada kemampuan *human nature*, percaya pada intelegensi manusia, dan pada kekuatan serta pengalaman untuk bekerja sama. Landasan demokrasi tersebut mendasari proses pendidikan dan dikembangkan dalam pendidikan. Mendidik siswa dengan mengembangkan intelegensi dan karakternya tidak terjadi ketika siswa hanya belajar dari buku teks dan dari apa yang ditentukan guru. Setiap siswa memperoleh pengetahuan ketika siswa memiliki kesempatan untuk menyumbangkan sesuatu dari pengalamannya, dan akhirnya pencerahan datang dari saling memberi dan menerima, dari perubahan ide dan pengalaman. Seperti dikatakan Dewey (2004: 36):

“Even in the classroom we are beginning to learn that learning which develops intelligence and character dose not come about when only the textbook and the teacher have a say; that every individual becomes educated only as he has an opportunity to contribute something from his own experience; no matter how meager or slender that background of experience may be at a given time; and finally that enlightenment comes from the give and take, from the exchange of experience and ideas”.

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan mempunyai maksud dan tujuan untuk membangkitkan sikap hidup demokratis dan untuk memperkembangkannya. Hal ini harus dilakukan dengan berpangkal kepada pengalaman-pengalaman siswa. Harus diakui bahwa tidak semua pengalaman berfaedah. Oleh karena itu, sekolah harus memberikan sebagai “bahan pelajaran” pengalaman-pengalaman yang bermanfaat bagi masa depan siswa sekaligus juga siswa dapat mengalaminya sendiri sehingga siswa dapat menyelidiki, menyaring, dan mengatur pengalaman-pengalaman tadi. Disini siswa dipandang sebagai subjek yang mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lain, yaitu dalam hal akal dan kecerdasan.

C. PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus menjiwai semua bidang pembangunan. Salah satu bidang pembangunan nasional yang sangat penting dan menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pembangunan karakter bangsa, di antaranya adalah pembangunan karakter demokratis yang dipupuk dalam pendidikan anak sejak dini.. Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa, yang di dalamnya termasuk pendidikan demokrasi, merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis.

Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Di dalam ranah demokrasi, misalnya, masyarakat Indonesia yang terbiasa sopan dan santun dalam berperilaku dan melaksanakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya akan pluralitas, serta bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur.

Sasaran pembangunan karakter bangsa yang mengandung pula pendidikan demokrasi mencakup beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah lingkup satuan

pendidikan. Satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan pendidikan (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pendidikan demokrasi, dalam hal ini, dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. Salah satu kunci keberhasilan pendidikan demokrasi pada satuan pendidikan adalah keteladanan dari para pendidik dan tenaga kependidikan. Keteladanan bukan sekedar sebagai contoh bagi peserta didik, melainkan juga sebagai penguat moral bagi peserta didik dalam bersikap dan berperilaku.

Pendidikan demokrasi dan belajar demokrasi di sekolah tidak dapat terlepas dari konsensus dasar Pembangunan Nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini bertujuan menghargai perbedaan dan keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang “adil dalam kemakmuran” dan “makmur dalam keadilan” dengan dasar Negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945. Pendidikan demokrasi harus memandang pentingnya keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat dipungkiri. Di dalam pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah, keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosiokultural, kekayaan yang bersifat kodrati dan alamiah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan untuk dipertentangkan dan diadu antara satu dengan yang lainnya sehingga terpecah-belah. Pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia sebagai bagian dari pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (nasionalisme), bukan untuk memecah-belah bangsa dan NKRI.

D. SISWA, KURIKULUM, DAN DEMOKRASI

Siswa mempunyai peranan penting bagi publik melalui peran positif yang dapat mereka mainkan dalam membantu pengembangan karakter warga negara di masa depan. Pengalaman siswa yang sederhana, pengalaman memberikan suara dalam lingkungan keluarga dan menghormati suara dan pilihan orang lain, pengalaman memahami bahwa penggunaan hak-hak juga menyangkut kewajiban-kewajiban, merupakan proses belajar yang penting sebagai latihan menjadi warga negara yang demokratis. Melalui keluarga pulalah para siswa untuk pertama kalinya mempelajari sikap-sikap terhadap masyarakat luas dan mengembangkan opini-opini tentang masalah-masalah politis yang mungkin masih berlanjut hingga mereka dewasa (Beetham dan Boyle, 2000: 172).

Nilai-nilai kehidupan demokrasi yang dapat dikembangkan di sekolah (Nurtjahyo, 2006: 73) antara lain:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan suka rela. Siswa secara aktif dan suka rela dibiasakan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan meminimalisir adanya pihak yang dirugikan
- b. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, baik kekerasan psikis maupun fisik. Kekerasan hanya akan memperuncingkan permasalahan dan dalam hal ini, keteladanan dari seluruh komponen masyarakat memiliki pengaruh yang sangat

besar dalam pengembangan sikap anti-kekerasan. Sekolah sebagai miniatur negara menjadi sangat rentan terhadap kejadian-kejadian kekerasan di dalam negara.

- c. Menghargai keanekaragaman (pluralitas). Berdasarkan pengalaman bahwa manusia itu unik, sikap menghargai keunikan orang lain menjadi dasar bagi kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan keadilan dalam memajukan ilmu pengetahuan atau menuntut ilmu. Aktivitas di sekolah adalah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan hal ini sekaligus memberikan hak kepada siswa untuk menuntut ilmu dalam suasana yang bebas dari tekanan, kekerasan, dan diskriminasi.
- e. Memberikan hak dan tanggung jawab yang memadai bagi semua pihak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam pendidikan. Demikian pula di dalam kehidupan demokrasi di sekolah yang juga menuntut tanggung jawab yang sama dalam kemajuan pendidikan.

Dari keluarga melangkah ke sekolah, itulah proses demokrasi yang terjadi pada siswa-siswa di sekolah. Kolaborasi di antara kedua lingkungan ini sangat menentukan kualitas sikap demokratis di kalangan generasi muda tersebut. Kemudian, peranan apakah yang dapat dimainkan oleh sekolah dalam bidang pendidikan? Selain mengemban tugas untuk membekali anak didik dengan ketrampilan dan kemampuan tertentu, khususnya tentang masalah melek huruf dan pengalihan pengetahuan, sekolah-sekolah juga memainkan peran yang penting dalam mewariskan nilai-nilai budaya dan tradisi yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Sekolah juga dapat memainkan peranan dalam melakukan evaluasi secara kritis terhadap budaya-budaya itu, dan dalam membantu siswa-siswi memahami tempat mereka dalam dunia yang saling bergantung dengan berbagai agama dan beraneka kepercayaan yang ada dalam masyarakatnya. (Beetham dan Boyle, 2000: 173).

Pelatihan yang lebih spesifik tentang demokrasi akan mengarah pada pemahaman tentang konstitusi negara yang bersangkutan dan bagaimana konstitusi ini secara terus-menerus dikembangkan. Pengetahuan yang bersifat demokratis seperti hak dan kewajiban warga negara, apresiasi tentang hak-hak asasi manusia, dan menghargai perbedaan menjadi hal yang urgen untuk dipahami bersama di antara seluruh komponen pendidikan di sekolah. Pendidikan demokrasi tidak hanya melibatkan usaha memperoleh pengetahuan. Pendidikan demokrasi, secara epistemologis diraih melalui pengalaman-pengalaman dalam perdebatan mengenai masalah-masalah penting masa kini, pengalaman mempresetasikan dan merepresentasikan argument dan mendengarkan pandangan orang-orang lain. Khusus dalam belajar demokrasi di sekolah, siswa memperoleh pengalaman dalam berbagai pengambilan keputusan secara kolektif mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan sekolah dan komunitasnya. Hal tersebut mereka dapatkan lewat pembentukan kelompok-kelompok diskusi di dalam kelas dan pengangkatan dewan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah melalui pemilihan umum di sekolah. (Beetham dan Boyle, 2000: 174)

Usia yang tepat untuk meraih berbagai keterampilan dan bidang pengetahuan yang beraneka-ragam ini bervariasi di setiap Negara dan berbeda-beda sesuai dengan pola system pendidikannya. Suatu sistem demokrasi yang mengabaikan pendidikan demokrasi di sekolah karena hal tersebut dianggap terlalu “politis” akan menanamkan risiko erosi serius terhadap basis kerakyatannya. Para pemikir masalah demokrasi selalu mengatakan bahwa praktik-praktik lembaga-lembaga demokratis yang sudah berjalan, termasuk di sekolah-sekolah, sangat membantu mengembangkan budaya demokratis. Di

sekolah, lembaga pendidikan dapat memberikan perangsang kepada siswa-siswa untuk memiliki wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah bagaimana mereka harus membuat keputusan-keputusan dan memupuk keterampilan berpartisipasi dalam permasalahan demokratis. Dengan demikian, akan terpujuklah budaya demokratis sejak awal.

E. MUATAN DEMOKRASI DALAM KURIKULUM

Demokrasi, seperti telah dinyatakan pada pembahasan di atas, mensyaratkan suatu urgensi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sedemikian pentingnya demokrasi ini, kurikulum pun harus mampu mewartakan asas-asas demokrasi yang sesuai dengan kehidupan persekolahan dan proses belajar-mengajar. Hal-hal yang dapat ditampung di dalam kurikulum dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kesetaraan sebagai Warga Negara

Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang sama dan sederajat. Menurut Jeremy Bentham, setiap orang dilihat sebagai satu dan tidak satu orang pun dilihat sebagai lebih dari satu. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan mereka. Dalam arti, orang tidak memberi kekuasaan dan kedudukan istimewa pada siswa yang kaya dan mengabaikan siswa miskin. Pada kenyataannya dewasa ini, rakyat yang miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga anak-anak miskin kurang berpendidikan sehingga mereka tidak dapat mengambil bagian dalam usaha menetapkan kebijaksanaan umum apa pun.

Di dalam kurikulum, kesetaraan ini harus dapat dimanifestasikan dalam setiap Rancangan Pembelajaran. Setiap siswa, tanpa membedakan status sosialnya, mengerjakan tugas yang sama, memperoleh informasi yang sama (tidak ada les tambahan bagi siswa kaya untuk memperoleh informasi lebih dibandingkan siswa miskin), mengeluarkan pendapat pada saat diskusi, serta memperoleh nilai yang adil untuk setiap evaluasi materi yang disampaikan. Dengan demikian, kompetensi yang diharapkan dapat merata dimiliki oleh setiap siswa. Selain daripada itu, siswa akan memahami dan mendapatkan pengalaman bahwa mereka diberi juga hak dan tanggung jawab yang sama atas kehidupan mereka sendiri.

2. Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum

Kurikulum demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa "biasa", bukan siswa pandai semata. Semakin besar kompetensi siswa dengan kemampuan rata-rata diperhatikan, semakin besar pula kemungkinan kurikulum itu mencerminkan dan menjangkau aspirasi siswa. Kurikulum yang dipakai tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa secara umum.

3. Pluralisme dan Kompromi

Pada prinsipnya, demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi dan kompromi (Beetham dan Boyle, 2000: 23). Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Demokrasi mengisyaratkan

kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara warga Negara. Metode demokratis untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, dan kompromi, dan bukan dengan pemaksaan atau pemeran kekuasaan.

Demikian pula prinsip-prinsip demokrasi yang berada dalam kurikulum yang diterapkan di sekolah. Ada baiknya apabila kurikulum menjamin keinginan dan suara siswa dalam penentuan materi pelajaran yang akan diberikan guru. Siswa bersama-sama mendiskusikan dan dengan partisipasi guru menentukan Rancangan Pembelajaran. Dengan demikian, apa yang mereka pelajari dan apa yang diajarkan guru adalah benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Semua bentuk aktivitas pembelajaran akan menyenangkan dan memuaskan baik bagi siswa maupun guru. Belajar dalam kelompok yang majemuk pun terakomodasi dengan baik karena prosesnya telah disepakati bersama. Siswa akan mendapatkan pengetahuan demokrasi yang bermanfaat bagi kehidupannya bermasyarakat sekaligus pengetahuan tentang materi yang disampaikan guru. Prinsip ini menuntut pula sikap demokratis dan kreatif dari guru yang bersangkutan.

4. Menjamin Hak-hak Dasar

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Diskusi terbuka, sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial, tidak dapat terwujud tanpa hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri (Beetham dan Boyle, 2000: 24) Negara demokratis dapat diandalkan untuk melindungi hak-hak tersebut, yang memang esensial bagi terwujudnya kelangsungan hidup suatu negara. Hak-hak tersebut memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya lahirnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik karena telah teruji dengan berbagai argument dan bukti.

Sekolah sebagai bentuk miniatur negara selayaknya memang selalu mengaktifkan forum diskusi, di dalam kelas dan berkaitan dengan setiap mata pelajaran maupun di luar kelas, pada kegiatan ekstrakurikuler, dan forum-forum lainnya. Bahkan, di dalam Rancangan Pembelajaran untuk setiap mata pelajaran disebutkan adanya aktivitas diskusi ini sebagai manifestasi proses demokrasi di dalam kurikulum.

5. Pembaruan Kehidupan Sosial

Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dengan cara demokratis (dalam arti melalui diskusi dan musyawarah untuk mufakat) menjadikan sistem-sistem demokratis mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial. Demikian pula halnya dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang selalu diperbaharui setiap saat sesuai dengan perubahan jaman. Kurikulum harus dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan terkini masyarakat secara umum dan siswa secara khusus.

F. SIMPULAN

Kehidupan demokrasi sebuah negara tidak dapat lepas dari bagaimana konsep dan praktek demokrasi dijabarkan dalam pendidikan. Hal-hal yang spesifik dalam pendidikan demokrasi dan pendidikan yang demokratis telah dibahas dan dianalisis oleh para filsuf. Secara filosofis, pengalaman berperilaku di sekolah yang diperoleh para

siswa akan menjadikan sumber pengetahuan mereka tentang bagaimana hal tersebut diterapkan dalam konteks kehidupan bernegara. Yang terpenting di dalam proses berdemokrasi dan belajar demokrasi di sekolah adalah adanya keteladanan, baik dari orang tua, guru, kepala sekolah, teman hingga pemerintah. Tanpa adanya keteladanan yang jelas, anak-anak akan memahami bahwa apa yang didapatkan dari pelajaran di sekolah tidak pernah ada kaitannya dengan kondisi nyata di kehidupan sehari-hari, bahkan saling bertentangan.

Secara esensial pendidikan demokrasi berperan untuk melahirkan dan mewujudkan kehidupan demokrasi di kalangan masyarakat. Diberikannya pendidikan demokrasi di sekolah merupakan salah satu alternatif penyelesaian untuk mengantisipasi konflik yang sering terjadi di masyarakat. Siswa belajar membiasakan diri untuk saling menghormati, tidak memaksakan kehendak, memahami kondisi lingkungannya, dan mengalisis permasalahan-permasalahan di sekolah sebagai miniatur masyarakat. Pendidikan demokrasi di sekolah diharapkan akan menghasilkan generasi penerus yang memiliki kompetensi personal dan sosial, yang menjunjung pilar-pilar demokrasi dengan mengedepankan kebebasan, persamaan, keadilan, keanekaragaman dan persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baechler, Jean, 2001, *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*, terjemahan Bern Hidayat, Kanisius, Yogyakarta.
- Beetham, David dan Boyle, Kevin, 2000, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, terjemahan Bern Hidayat, Kanisius, Yogyakarta.
- Gerald L., Gutek, 1988, *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*, Prentice Hall, Englewood.
- Haricahyono, Cheppy, 1995, *Dimensi-dimensi Pendidikan Moral*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Hendra Nurtjahyo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, Pemerintah Republik Indonesia.
- Kilpatrick, William Heard, 1957, *Philosophy of Education*, Mac. Millan, New York.
- Prasetya, 2002, *Filsafat Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.